



Setahun, Penghematan Tender Capai Rp 24 Miliar

Singaraja (Bali Post) -

Tender dengan sistem *online* yang diterapkan di Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Barang dan Jasa Pemkab Buleleng, memberikan hasil positif. Tidak hanya mengedepankan prinsip transparan dan akuntabel, pelaksanaan tender terbuka tersebut mampu menghemat anggaran dengan angka fantastis. Dari 120 paket pekerjaan yang berhasil ditenderkan di tahun 2017 lalu, BLP mencatat efisiensi anggaran dari tender itu mencapai Rp 24 miliar lebih.

Kepala BLP Barang dan Jasa Ir. Made Budi Setiawan, Rabu (3/1) kemarin, mengatakan dari dokumen lelang yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada APBD tahun 2017, tercatat 130 paket pekerjaan. Sebelum diumumkan melalui aplikasi LPSE, ratusan paket tender tersebut dikaji oleh masing-masing kelompok kerja (pokja).

Dari pengkajian itu, selama se-

tahun yang lalu BLP menetapkan 120 paket pekerjaan mulai dari pengerjaan konstruksi dan jasa telah memenuhi syarat dan diumumkan lewat aplikasi LPSE. Dari tahapan itu, kemudian tender berjalan sesuai mekanisme dan paket pekerjaan itu pun mendapatkan rekanan sebagai pemenang tender. Dari catatannya, total nilai pagu paket pekerjaan itu mencapai Rp 165.605.005.640.

Dari jumlah itu nilai penawaran senilai Rp 141.027.310.500. Dengan demikian, total penghematan tender yang terkumpul mencapai Rp 24.397.695.140. "Proses tender sepenuhnya mengacu mekanisme dan memang tender *online* ini semua tahapannya dilakukan dengan transparan. Dari pagu anggaran itu ada sisa lelang nilainya cukup tinggi," katanya.

Menurut Budi, penghematan tender dalam setahun tersebut didominasi oleh paket pekerjaan perbaikan jalan yang dianggarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Ruang (PU-PR). Efisiensi tender untuk paket perbaikan jalan ini tergolong tinggi, karena setahun

lalu, pemerintah masih melanjutkan perbaikan jalan yang masih belum dikerjakan tuntas. Ditambah dengan banyaknya jalan yang naik status dari jalan lingkungan menjadi jalan kabupaten, sehingga perbaikannya dialokasikan dalam APBD. Terkait penghematan tender tersebut sudah dikembalikan kepada OPD bersangkutan. Terkait pemanfaatannya, dia menyebut hal itu menjadi kewenangan pimpinan di masing-masing OPD terkait. "Untuk apa hasil penghematan itu, ya kami serahkan kepada pimpinan OPD-nya dan kebijakan pimpinan di daerah. Yang pasti kalau dialokasikan kembali di tahun ini paket pekerjaan tentu kami hanya memproses pengadaannya saja," tegasnya. (kmb38)

Edisi : Kamis, 4 Januari 2018

Hal : 11



Anggaran Pengamanan Pilkada Rp 20 Miliar

Polisi Petakan Titik Rawan

Denpasar (Bali Post) -

Persiapan pengamanan Pilkada 2018 telah dilakukan Polda Bali beserta jajarannya. Dana pengamanannya dianggarkan Rp 20 miliar. Anggaran tersebut berdasarkan hasil rapat pembahasan finalisasi APBD Induk 2018 antara DPRD Bali dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali, belum lama ini.

Kamis (4/1) kemarin, Polda Bali dan Polres se-Bali menggelar latihan Praops Mantap Praja Agung 2018 dan memetakan titik rawan. "Kita bersyukur dana pengamanan pilkada tahun ini ada kenaikan. Hal tersebut tidak lepas dari perjuangan Bapak Kapolda Bali. Terkait

kerawanan, kemungkinan terjadi saat masa kampanye, masa tenang dan hari H pencoblosan. Kita menyiapkan tim penyidik sebagai antisipasi terjadinya pelanggaran dalam tahapan pilkada," kata Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Hadi Purnomo dalam sambutannya saat

membuka latihan Praops Mantap Praja Agung 2018 di salah satu hotel di Denpasar.

Menurut Hadi Purnomo, pada Pilkada 2018 ada 20 tahap. Di antaranya, pendaftaran paslon tanggal 8 Januari. Pihaknya berupaya memberikan imbauan kepada para kandidat saat pendaftaran didampingi perwakilan saja.

Terkait latihan tersebut, mantan Kapolres Gianyar ini berharap seluruh peserta memperhatikan materi yang disampaikan narasumber. Dengan demikian, benar-benar memahami dan menguasai cara

bertindak saat operasi ini dilaksanakan.

Kegiatan serupa juga dilakukan Polres Badung di GOR Mengwi, Badung. Polres Badung beserta jajaran dibantu instansi terkait siap mengamankan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 secara profesional dan prosedural.

Menurut Kapolres Badung AKBP Yudith Satriya Hananta, tujuan dilaksanakannya pelatihan tersebut di antaranya untuk meningkatkan dan menyinergitaskan kemampuan teknis dan taktis operasi, melatih prosedur, koordinasi dan

kerja sama. Di samping itu, dapat mencapai target yang ingin dicapai dan berguna untuk mendukung pelaksanaan operasi. "Pelatihan ini berlangsung selama dua hari yaitu Kamis dan Sabtu. Dengan pelatihan ini, dalam pelaksanaannya nanti seluruh personel mampu menguasai apa yang harus diperbuat pada tahapan pilkada nanti," tegasnya. (kmb36)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391

Edisi : Jumat, 5 Januari 2018

Hal : _____



Yonda Masih Terima Hak Gaji

- BK Bahas Status Anggota DPRD Badung
- Kasus Dugaan Reklamasi Liar Tanjung Benoa

MANGUPURA, TRIBUN BALI - Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung melakukan pembahasan terkait status Anggota DPRD Badung, I Made Wijaya alias Yonda yang terjerat kasus dugaan reklamasi liar dan pembabatan hutan di Pantai Tanjung Benoa. Pihak BK mengaku akan melakukan konsultasi ke Ke-

menterian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk status Yonda yang juga Bendesa Adat Tanjung Benoa ini.

Menurut informasi yang dihimpun *Tribun Bali*, Senin (8/1), saat ini status Yonda masih tetap sebagai anggota DPRD Badung dari Fraksi Gerindra. Pasalnya, masih belum ada keputusan pemberhenti-

an dari pihak DPRD Badung. Yonda pun masih menerima haknya seperti gaji, tunjangan, dan lainnya.

Ketua BK DPRD Badung I Nyoman Sentana mengatakan, akan melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait masalah ini khususnya menyangkut hak-hak yang diterima Yonda.

"Kami akan konsultasi dulu kesana (kemendagri). Khususnya terkait haknya yang mana boleh diberikan yang mana tidak," ujar Sentana, kemarin.

Menurutnya, jika sudah melakukan konsultasi pihaknya akan mengetahui secara jelas apa yang boleh diberikan atau tidak. Sentana menyebutkan, meskipun sudah ada vonis yang diberikan, keluarga akan melakukan banding karena keputusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau *in kracht*.

"Ada informasi bahwa keluarga akan melakukan banding, karena kan keputusannya belum inkrah. Kami juga di BK belum menerima tembusan terkait kasus tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Yonda yang menjadi terdakwa dalam kasus pengurangan liar dan pemotongan pohon mangrove di Taman hutan rakyat (Tahura) Tanjung Benoa divonis pidana setahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada Jumat (22/12). Pun, lima terdakwa lainnya yaitu I Made Marna, I Ketut Sukada, I Made Metra, I Made Dwi Widnyana, dan I Made Suartha dijatuhi vonis

yang sama, setahun penjara. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim pimpinan I Ketut Tirta lebih tinggi dibanding tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tim JPU Suhadi dkk sebelumnya menuntut Yonda dan lima terdakwa lainnya dengan dakwaan alternatif kedua yakni kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Hutan Raya, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 2 Jo Pasal 33 ayat (3) UU RI No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDA-E) Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yonda sendiri dituntut delapan bulan penjara, denda Rp 10 juta susudair dua bulan kurungan. Sementara kelima terdakwa lainnya, dituntut lebih ringan yakni enam bulan penjara, serta denda Rp 5 juta, subsidair dua bulan kurungan.

Terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut, para terdakwa melalui tim penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Pula, tim JPU Suhadi dkk menyatakan kepada majelis hakim hal yang sama. "Setelah berunding, saya pikir-pikir yang mulia majelis hakim. Saya ucapkan terimakasih, semoga semuanya mendapat berkah," ucap Yonda sembari mencakupkan kedua tangannya dan kembali menyatakan rasa terima kasih kepada awak media dan pengunjung sidang waktu itu. (mpa/can)



TRIBUN BALI/RIZAL FANANY

VONIS - Anggota DPRD Badung, I Made Wijaya alias Yonda divonis pidana setahun penjara denda Rp 500 juta subsidair dua bulan kurungan oleh majelis hakim di PN Denpasar, Jumat (22/12).

Sesuai Tata Tertib

SEKRETARIS DPRD (Sekwan) Badung, Nyoman Predangga mengatakan, hak Yonda sebagai anggota DPRD masih diberikan karena kasus tersebut belum *in kracht*.

"Selama ini masih bisa diberikan itu (gaji) karena kasusnya juga belum inkrah dan belum ada pemberhentian," ujarnya.

Predangga menyebutkan, sesuai dengan Tata Tertib (Tatib) DPRD Badung Nomor 1 Tahun 2017 pada ayat 7 menyatakan, bahwa anggota dewan yang diberhentikan sementara masih bisa menerima haknya.

Dia melanjutkan, hak yang dimaksud adalah seperti uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan peraturan undang-undang. "Masih bisa diterima, karena tembusan surat resmi belum ada juga. Jadi Yonda masih menerima haknya," tandasnya. (mpa)

Edisi : Selasa, 5 Jan 2019

Hal : _____



Disebut Menikmati, Susila Ditetapkan sebagai Tersangka

Kasus Alkes RSUD Mangusada Berkembang

Denpasar (Bali Post) -

Sidang dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD Mangusada Badung yang proses tendernya penuh rekayasa, tidak berhenti pada dua tersangka (kini terdakwa - red) Muhammad Yani Kanifudin dan I Ketut Sukartayasa. Nama satu ini juga yang muncul dalam persidangan dan uraian tuntutan jaksa untuk dua terdakwa dimaksud, sebagaimana terungkap di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Nama I Made Susila adalah nama pria yang sering disebut di Pengadilan Tipikor Denpasar. Nama itu juga sering disebut oleh Muhammad Yani Kanifudin, terdakwa yang perusahaannya dipinjam untuk memenangkan tender. Dengan munculnya

nama Made Susila, juga menjadi pengaruh dalam tuntutan jaksa.

JPU Wayan Suardi mengatakan, soal pengembalian kerugian keuangan negara tidak mutlak pada Yani. "Yani sendiri tidak tahu bahwa perusahaan miliknya ikut tender dan jadi pemenang," ujar Suardi, belum lama ini.

Menurut Suardi, yang menikmati kerugian keuangan negara adalah Made Susila. "Dia yang menikmati sehingga dia harus bertanggung jawab. Sudah saya sebut dalam tuntutanannya. Itu fakta persidangan," kata jaksa yang lama bergelut di bidang tipikor itu.

I Made Susila dalam proyek pengadaan alkes di RSUD Mangusada cukup dominan. Bahkan, Susila dinyatakan mempunyai peran besar sebagai pengatur

proyek pengadaan tersebut. Terungkapnya peran Susila berdasarkan fakta persidangan untuk dua terdakwa yaitu Muhammad Yani Khanifudin selaku Dirut PT Mapan Medika Indonesia (MMI) dan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Ketua Panitia Lelang RSUD Mangusada I Ketut Sukartayasa.

Atas dasar itu, Suardi mengatakan Susila sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak penyidik Polda Bali. "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikannya (SPDP) sudah ada. Tapi penyidikan kasus ini kan ditangani oleh Polda Bali," tandas pria yang menjabat Kasi Penuntutan Pidsub Kejati Bali ini.

Dari fakta persidangan terungkap, kata Suardi Susila yang menikmati keuntungan dari pen-

gadaan alkes RSUD itu. Keuntungan itu digunakan oleh Susila untuk kepentingan pribadi. "Pembuktian di persidangan bahwa Susila yang menikmati semua keuntungan. Dia pakai bayar utang dan dipakai keperluan pribadi. Yang jelas, transfer dilakukan atau melalui proses dia sendiri. Tidak ada orang lain selain Susila. Dia yang mengatur semuanya," tegas Suardi.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah melakukan pemeriksaan cukup lama, kasus dugaan korupsi pengadaan alkes di RSUD Mangusada Badung memasuki sidang tuntutan, Rabu (3/1) lalu.

JPU Wayan Suardi di hadapan majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila menuntut kedua terdakwa (dalam sidang terpisah), yakni terdakwa Muhammad Yani Ka-

nifudin dan I Ketut Sukartayasa dengan pidana masing-masing satu tahun enam bulan (1,5 tahun). Yang membedakan hanya pembayaran uang pengganti sebagai akibat kerugian keuangan negara.

JPU Suardi dalam tuntutan untuk terdakwa Muhammad Yani Kanifudin, selain hukuman fisik selama 1,5 tahun, terdakwa dituntut membayar denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa dalam surat tuntutan juga menyatakan supaya terdakwa yang akrab dipanggil Yani itu membayar uang pengganti sebesar Rp 67.885.264, subsider sembilan bulan penjara. Sedangkan untuk terdakwa I Ketut Sukartayasa dituntut hukuman fisik selama 1,5 tahun denda Rp 100 juta, subsider enam bulan kurungan. (kmb37)



Penataan Lapangan Puputan dan Pantai Goa Lawah

Dianggarkan Rp 9,8 Miliar

Semarang (Bali Post) -

Penataan ruang publik kembali digulirkan Pemkab Klungkung tahun ini. Sesuai perencanaan, akan menasar Lapangan Puputan Klungkung dan Pantai Goa Lawah, Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 9,8 miliar.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Rabu (10/1) kemarin menjelaskan, penataan Lapangan Puputan yang selama ini dijadikan masyarakat sebagai tempat berolahraga maupun aktivitas lainnya menjadi skala prioritas. Bahkan, perencanaannya sudah rampung tersusun. Anggaran yang disiapkan tak tanggung-tanggung.

Untuk penataan taman maupun pengadaan pendukung lain, seperti *trekking* dan tempat duduk mencapai Rp 2,3 miliar. Di lokasi ini juga direncanakan ada pembangunan patung Ida Dewa Agung Jambe yang dianggarkan Rp 4 miliar. "Taman bermain juga ada untuk anak-anak, dewasa dan lansia. Wifi ditambah. Seluruhnya akan ditata. Total anggaran Rp 6,3 miliar," tegasnya.

Bupati asal Nusa Ceningan ini menyatakan lapangan tersebut juga sekaligus menjadi Bencingah Puri Agung Klungkung sebagai tempat



Bali Post/sos

PENATAAN - Lapangan Puputan Klungkung. Tahun ini Pemkab berencana melakukan penataan dengan anggaran miliaran rupiah. Hal serupa juga akan dilakukan pada Pantai Goa Lawah.

raja bersama keluarga untuk melihat suasana perkotaan. "Ini wujud apresiasi saya kepada tokoh puri beserta keluarga. Cara menempatkan beliau banyak. Termasuk *city tour* yang juga bisa ke puri," ungkapnya.

Disampaikan lebih lanjut, dengan ruang publik yang tertata, diharapkan masyarakat bisa menghabiskan waktu berlibur di tengah kota. Tidak harus keluar menuju daerah lain. Selain itu, tingkat kebahagiaannya dapat meningkat karena telah mendapatkan tempat yang nyaman dan

layak. "Dengan situasi seperti sekarang, banyak yang jalan-jalan di lapangan. Harapan saya dengan penataan, masyarakat tidak jauh-jauh langcong. Nikmati saja yang ada di sini," ucapnya.

Sementara itu, untuk penataan Pantai Goa Lawah, dianggarkan Rp 3,5 miliar. Objek wisata ini nantinya akan diintegrasikan dengan pertanian garam yang juga dibangkitkan Pemkab. "Setelah jadi akan dikelola desa," imbuhnya.

Perbekel Pesinggahan Nyoman Suastika sempat menyatakan kondisi pantai masih

terkesan kumuh. Adanya rencana penataan oleh Pemkab dinilai sebagai langkah strategis. "Sekarang kunjungan saat hari libur cukup ramai. Tetapi pantai masih kumuh. Kalau ada rencana penataan, kami sangat mendukung," ujarnya.

Selain itu, penataan ini juga untuk mendukung status Desa Pesinggahan sebagai desa wisata. Ke depan, langkah serupa juga diharapkan dapat dilakukan pada Bukit Tengah yang lokasinya berdekatan. "Kami berharap penataan ini juga bisa dilakukan," pungkasnya. (kmb45)

Edisi : kamis, 11 Januari 2017

Hal : _____



Selamatkan Aset Eks BKKBN

Pemkab Pastikan Gugatan Hukum Ajukan

Singaraja (Bali Post) -

Masih ingat dengan temuan Badan Keuangan Daerah (BKD) terhadap aset tanah eks Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Desa Pemaron, yang disertifikatkan oleh warga? Setelah melengkapai dokumen terkait aset itu, Pemkab Buleleng akan mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Upaya ini ditempuh karena Pemkab tidak ingin kehilangan aset. Apalagi, belakangan ini Pemkab masih memerlukan lahan untuk fasilitas penunjang pemerintahan.

Informasi yang dikumpulkan di lapangan Rabu (10/1) kemarin, menyebutkan berkas dan dokumen kepemilikan aset tanah yang dilimpahkan Pemprov Bali kepada Pemkab telah terkumpul. Berkas ini dikumpulkan Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng. Sekitar satu minggu yang lalu, BKD telah menyerahkan berkas dan bukti kepemilikan berupa

Sertifikat Hak Pakai (SHP) itu kepada Bagian Hukum Setda Buleleng. Sebelum mengajukan gugatan ke PN Singaraja, berkas itu masih dikonsultasikan kepada tim advokasi hukum Pemkab. Meski belum pasti kapan waktunya, upaya hukum ini pasti ditempuh untuk menyelamatkan aset yang diam-diam telah dikuasai warga.

Kepala Bagian Hukum

Setda Buleleng Bagus Gede Bratha yang dihubungi kemarin, membenarkan pihaknya telah menerima berkas dan bukti kepemilikan aset eks BKKBN tersebut. Dia mengatakan, upaya hukum dengan melayangkan gugatan sudah pasti akan ditempuh oleh Pemkab. Namun, pihaknya perlu mengkaji berkas itu termasuk mempelajari ter-

kait celah hukum untuk memperkuat berkas gugatan. Terkait bukti kepemilikan berupa SHP atas tanah eks BKKBN, Bagus Bratha mengatakan, bukti tersebut memang sudah cukup kuat sebagai hak kepemilikan atas aset tanah tersebut. Namun, perlu didalami karena aset yang dikuasai warga itu telah memiliki bukti Sertifikat Hak Milik (SHM). "Sudah kami terima dan sekarang kami masih mengkaji bersama tim advokasi untuk mencari celah hukumnya agar gugatannya kuat. Yang pasti Pemkab akan menggugat karena pemerintah tidak ingin aset hi-

lang begitu saja," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tanah milik BKKBN yang sudah diserahkan kepada Pemkab Buleleng dikuasai perorangan. Sesuai SHP No. 4 Tahun 1987 Desa Pemaron Pemkab menerima aset tanah seluas 3,6 are. Belakangan, diketahui satu are dikuasai warga dan telah bersertifikat hak milik. Celakanya, tanah yang sudah tercatat sebagai SHM itu sekarang disita oleh bank karena diduga sebelumnya dijadikan jaminan kredit. Meski telah berkurang dari luas keseluruhannya, Pemkab memfungsikan aset itu sebagai gedung kantor sekretariat penyuluh KB-PP sampai sekarang. (kmb38)

Edisi : Kamis, 11 Januari 2018

Hal : 11



Temuan BPK di RSUD dan Dinkes Polisi Tak Temukan Unsur Tindak Pidana

Singaraja (Bali Post) –

Unit Reskrim Polres Buleleng tidak menemukan adanya unsur tindak pidana pada belasan poin temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali pada penyelenggaraan keuangan di RSUD dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Buleleng. Polisi melakukan klarifikasi dan bahkan memanggil beberapa direksi RSUD dan pejabat di Dinkes. Namun penyelidikan itu tidak menemukan adanya unsur pidana pada temuan tersebut. BPK-RI Perwakilan Bali menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu, 24 November 2017 lalu. Polisi kemudian mendalami 13 poin temuan itu. Dari seluruh poin temuan BPK, polisi tidak menemukan unsur pelanggaran pidana.

Kasat Reskrim AKP Mikael Hutabarat, seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK. akhir pekan lalu mengatakan, pihaknya sudah mendalami seluruh poin temuan LHP tersebut. Termasuk dugaan keterlibatan oknum tenaga kontrak di RSUD dalam proses pengadaan pekerjaan di rumah sakit plat merah tersebut. Penyelidikan secara khusus pada dugaan keterlibatan tenaga kontrak itu, karena perusahaan yang dikelolanya memenangkan belanja cetak rekam medis tahun anggaran 2016 pada RSUD Buleleng. "Tiga belas poin temuan itu sudah kita klarifikasi, termasuk keterlibatan oknum tenaga kontrak. Semua dokumen sudah kami cek untuk dipelajari, tapi hasilnya kami belum menemukan adanya unsur pelanggaran pidana," katanya.

Di sisi lain AKP Hutabarat mengatakan, sejauh ini polisi belum pernah melakukan pemanggilan saksi. Namun polisi sempat mengundang beberapa pejabat terkait di RSUD Buleleng dan Dinas Kesehatan Buleleng untuk meminta penjelasan. Upaya ini sifatnya hanya mengklarifikasi dan bukan pemeriksaan. "Kita hanya mengklarifikasi dan bukan pemeriksaan, karena belum ada laporan polisi," jelasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, BPK Perwakilan Bali melalui LHP No. 22/LHP/XIX.DPS/11/2017 tanggal 24 November 2017 menemukan 13 poin dalam pelaksanaan keuangan di RSUD dan Dinkes Buleleng. Temuan itu merujuk pada kelemahan sistem pengendalian internal, serta beberapa hal tidak patut yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Dari 13 poin temuan itu, dua poin yang saling berhubungan, yakni dugaan oknum pegawai kontrak RSUD yang terlibat dalam proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS - red) belanja cetak rekam medis pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Dari lima perusahaan percetakan yang konon disurvei oleh oknum pegawai tersebut, hasilnya dua perusahaan diragukan keabsahannya. Perusahaan yang memenangkan pekerjaan itu diketahui milik oknum tenaga kontrak itu sendiri. Setelah memenangkan proyek, pekerjaannya justru dialihkan atau disubkontrakan kepada rekanan lain.

Temuan LHP BPK ini telah direkomendasikan oleh DPRD kepada Bupati Buleleng, yaitu 13 poin rekomendasi sesuai jenis temuan di dua lembaga tersebut. Isi rekomendasi pada setiap poin itu terkesan sama dengan penjelasan yang disampaikan BPK-RI. Rekomendasi dinilai kurang tajam.

Khusus untuk temuan di RSUD, dewan mendesak agar Bupati melakukan pergantian direksi RSUD karena dianggap tidak mampu melaksanakan penyelenggaraan kesehatan dengan baik. Dewan juga mengusulkan pemerintah tidak melibatkan tenaga kontrak dalam melaksanakan proyek di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, rekanan pemenang tender tidak melakukan praktik mensubkan (mengalihkan) pekerjaannya kepada kontraktor lain. Hal ini untuk menghindari terjadinya temuan seperti yang terjadi di RSUD dan Dinkes Buleleng. (kmb38)

Edisi : Sabtu, 13 Januari 2018

Hal : _____



Mantan Kepala BPN Bersaksi Kasus Tahura

Denpasar (Bali Post) -

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Denpasar periode 2007-2011 Tri Nugraha, Rabu (17/1) kemarin bersaksi dalam kasus korupsi tahura. Ia menjadi saksi untuk terdakwa I Wayan Suwirta, pemilik lahan dan I Wayan Sudarta alias Agus yang mengurus pensertifikatan.

Di hadapan majelis hakim tipikor pimpinan I Wayan Sukanila, Tri Nugraha dicerca berbagai pertanyaan soal mekanisme pensertifikatan tanah. Di muka persidangan atas dakwaan pensertifikatan dan penjualan lahan Tahura seluas 835 m³ itu, ia mengaku sempat mengembalikan berkas karena ada keberatan dari kehutanan. Namun,

pihak BPN meminta pemohon sertifikat melengkapi bukti autentik seperti surat penguatan pernyataan fisik dan blangko ditandatangani kepala desa.

Apakah BPN punya *back-up* data tentang tanah? Saksi mengatakan tidak ada. Yang ada di BPN didaftarkan secara sporadik atau sudah didaftarkan dan bersertifikat. Lantas, bagaimana proses pensertifikatan tahura bisa berlanjut? Tri Nugraha menyatakan secara prosedural saja. "Karena sudah diparaf oleh kasi, ya... saya tanda tangan," jelas mantan Kepala BPN Denpasar ini.

Atas terbitnya sertifikat yang diklaim sebagai lahan tahura seluas 835 m³ itu, Tri Nugraha menyampaikan sampai

sekarang tidak ada pencabutan sertifikat. Itu artinya sertifikat masih berlaku dan sebagai bukti kepemilikan yang sah.

Dikonfirmasi usai sidang, Tri Nugraha ngotot dan yakin bahwa tanah itu milik terdakwa Suwirta. "Karena diketahui desa. Yang paling mengetahui kondisi lapangan kan pihak desa. Tanah itu tidak berbatasan dengan hutan," tegasnya.

Soal keberatan pihak tahura, Tri Nugraha mengatakan bahwa hal itu diuji dalam TUN. Di TUN yang teruji, itu milik Suwirta. Karenanya, sertifikat yang diklaim tanah tahura yang dikantongi Suwirta sampai saat ini sah dan berlaku milik Suwirta. (kmb37)

Edisi : Kanms, 18 Januari 2018

Hal : 5



Pemprov Bali Anggarkan Rp 10 Miliar Persiapkan 500 Tenaga Kerja ke Luar Negeri

Denpasar (Bali Post) -

Pemprov Bali tahun ini akan mempersiapkan 500 tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Baik di kapal pesiar, perhotelan, maupun spa. Tidak tanggung-tanggung, biaya yang dianggarkan mencapai Rp 10 miliar. Anggaran ini pun sebetulnya hanya setengah dari rancangan awal Rp 20 miliar untuk mempersiapkan hingga seribu tenaga kerja.

"Banyak masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri tapi tidak memiliki biaya," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Luh Made Wiratmi dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Bali di Gedung Dewan, Rabu (17/1) kemarin.

Selain itu, lanjut Wiratmi, rupanya masih banyak lulusan SMK terutama SMK perhotelan di Bali yang belum diterima bekerja. Hal tersebut sesuai hasil peninjauan langsung ke sekolah-sekolah bersama Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan. Secara kebetulan, angka pengangguran di Bali saat ini memang lebih banyak disumbang oleh lulusan SMK sebesar 1,48 persen.

Menurutnya, program ini diprioritaskan untuk masyarakat miskin agar bisa bekerja ke luar negeri. Pihaknya segera melakukan konsolidasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk merekrut calon tenaga kerja yang benar-benar miskin dari sembilan daerah secara adil dan merata. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan BP3TKI, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), serta OPD terkait di Pemprov Bali. Setiap tenaga kerja khusus ke kapal pesiar dianggarkan kurang lebih Rp 20 juta untuk biaya pelatihan atau training penyeragaman sebelum dikirim ke luar negeri, *medical check-up* di Jakarta atau Surabaya, biaya visa, paspor, *basic*

safety training, buku pelaut, hingga BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, keseluruhan anggaran Rp 10 miliar tidak termasuk dengan biaya tiket keberangkatan karena akan ditanggung oleh *user* tenaga kerja.

"Sekarang tinggal membuat juklak-juknis. Maret-April kami harapkan selesai. Jadi, nanti perlu ada seleksi yang ketat. Selain memiliki kartu kuning, juga harus ada rekomendasi benar-benar miskin dari kabupaten/kota. Bali baru pertama kali melaksanakan program ini di Indonesia. Kalau berhasil, kita akan diberikan kuota lebih banyak lagi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta menilai terobosan Pemprov Bali ini bagus sehingga dewan mendukung penuh. Dinas Tenaga Kerja dan ESDM diminta untuk bekerja secara serius agar program yang dibiayai APBD ini bisa terealisasi dengan baik. Terutama dalam mengatasi segala kendala teknis yang mungkin muncul. Mulai dari mekanisme tender, persyaratan, hingga hubungan dengan pihak imigrasi dan *user*. Pasalnya, ada *user* yang memang menyediakan biaya tiket dan akomodasi. Namun, ada pula yang tidak.

Diwawancara terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD) Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda mengatakan, tender belanja jasa tenaga kerja pihak ketiga disiapkan untuk tiga jenis kompetensi. Yakni, belanja jasa penempatan TKI Perhotelan untuk 100 paket masing-masing Rp 17,65 juta, belanja jasa penempatan TKI Kapal Pesiar untuk 250 paket masing-masing Rp 20 juta, serta belanja jasa penempatan TKI Spa untuk 150 paket masing-masing Rp 17,65 juta. (kmb32)

Edisi : Kamis, 18 Januari 2018

Hal : 5